

Potret Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Satu Atap (MTs-SA) Miftahul Ulum - Pandeglang

Iyoh Mastiyah

Abstract

This evaluation intends to reveal an administration program on MTs-SA (Islamic Junior High School-One Ceiling Program) carried out by the Ministry of Religious Affairs cooperates with the Government of Australia (AIBEF). The program accomplished the development for MTs-SA in several regions and most of its educational activities run well. Nevertheless, in its administration is still found some troubles and obstructions either from location selection or operation. This writing will discuss on how the administration program of MTs-SA Miftahul Ulum in Munjul Sub-District, Pandeglang District seen from the aspects of educational access improvement, community participation and management.

Keywords: *MTs-SA, educational access, community participation and management.*

Dr. Hj. Iyoh Mastiyah, M.Ag
bekerja pada Pusdiklat
Teknis – Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama
RI

Naskah diterima 10 Mei
2011. Revisi pertama, 30
Mei 2011, revisi kedua, 15
Juni 2011 dan revisi
terakhir 25 Juli 2011.

Abstrak

Evaluasi ini ingin mengungkap program penyelenggaraan MTs-SA yang dilakukan oleh Kementerian Agama bekerjasama dengan Pemerintah Australia (AIBEF). Program tersebut telah menyelesaikan pembangunan MTs-SA di berbagai wilayah dan sebagian besar kegiatan pendidikannya telah berjalan. Namun dalam penyelenggaraannya masih terdapat berbagai masalah dan kendala, baik dari sisi pemilihan lokasi maupun pada tataran operasionalnya. Tulisan ini akan membahas bagaimana program penyelenggaraan MTs-SA Miftahul Ulum di Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang, dilihat dari aspek-aspek peningkatan akses pendidikan, partisipasi masyarakat dan tata kelolanya.

Kata Kunci : MTs-SA, akses pendidikan, partisipasi masyarakat, tata kelola

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini masih banyak masyarakat di beberapa wilayah yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan, karena letak geografis yang begitu jauh dari pusat pembangunan atau karena terisolir dari masyarakat luar, atau bahkan karena perbedaan budaya. Selain itu, yang mendasar adalah alasan ekonomi, dimana masyarakat tidak mampu membiayai pendidikan akibat mahalnya biaya pendidikan. Padahal UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 5 [1] menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal ini juga dituangkan pada pasal 4 [5] bahwa pada dasarnya pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa kecuali. Pada pasal 5 [3] dinyatakan bahwa warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Untuk itu, dalam rangka memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat, Kementerian Agama telah bekerjasama dengan

pemerintah Australia, melaksanakan pembangunan Madrasah Tsanawiyah Satu Atap (MTs-SA). Program pembangunan MTs-SA merupakan bagian dari program pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan dasar untuk mendukung penuntasan Wajib Belajar dan peningkatan mutu lulusan melalui peningkatan peran serta masyarakat serta pemberdayaan institusi pendidikan terutama swasta yang banyak melayani golongan masyarakat ekonomi kurang mampu. Pilihan ini dilakukan mengingat jumlah madrasah yang diselenggarakan oleh swasta jauh lebih besar dari pada madrasah negeri.

Kementerian Agama telah membangun MTs-SA secara terpadu dengan Madrasah Ibtidaiyah atau satuan pendidikan dasar formal sederajat lainnya yang berlokasi di pesantren dan membangun Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) secara terpadu dengan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di bawah naungan Kementerian Agama.¹ Sejak tahun 2006 hingga 2009 telah selesai dibangun sebanyak 500 MTS-SA dan salah satunya adalah MTs-SA Miftahul Ulum. Melalui MTS-SA tersebut diharapkan tahun 2009, angka partisipasi kasar (APK) mencapai target 95 persen.²

Dari sisi penyelenggaraan, MTS-SA diduga mengalami kendala mulai dari pemilihan lokasi hingga pemenuhan persyaratan yang belum konsisten dengan ketentuan pedoman. Dalam tulisan ini, penelitian evaluasi program MTS-SA difokuskan pada MTs-SA Miftahul Ulum di Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang, sebagai salah satu sasaran program tersebut.

¹ Departemen Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Madrasah. 2008. *Pedoman Teknis Pembangunan Madrasah Tsanawiyah Satu atap*. Jakarta: Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pendidikan Dasar (AIBEF), h. 2

²http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/22/kat/33/news_id/5088

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang diangkat dalam evaluasi ini adalah persoalan penyelenggaraan MTs-SA Miftahul Ulum di Kecamatan Munjul Pandeglang; 1) apakah penyelenggaraan MTs-SA dapat meningkatkan akses pendidikan dasar? 2) bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan MTs-SA ? dan 3) bagaimana tata kelola penyelenggaraan MTs-SA.

C. Tujuan Penelitian

Evaluasi ini ingin mendeskripsikan potret penyelenggaraan MTs-SA Miftahul Ulum di Kec. Munjul Kab. Pandeglang. Secara khusus, bertujuan mendeskripsikan tingkat keterlaksanaan penyelenggaraan MTs-SA dalam meningkatkan akses pendidikan dasar, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan MTs-SA, dan tata kelola penyelenggaraan MTs-SA.

D. Manfaat Penelitian

Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kementerian Agama, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan tentang keberlangsungan program penyelenggaraan MTs-SA dan menjadi bahan informasi serta masukan bagi para penyelenggara MTs-SA, khususnya MTs-SA Miftahul Ulum.

E. Metodologi Penelitian

Evaluasi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sasaran penelitian yaitu MTs-SA Miftahul Ulum di Kampung Lebaksono Desa Panacaran Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang yang telah beroperasi selama 10 bulan. Pengumpulan data digunakan alat pedoman wawancara, observasi, daftar isian dan studi dokumentasi dengan informan kunci yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan MTs-SA, yaitu ketua yayasan, Kepala MTs-SA, guru, siswa, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat serta Kasi Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang.

Adapun analisa data diawali dengan merekam dan mencatat berbagai informasi dan fenomena yang ada di lapangan, melakukan pemilahan dan kategorisasi, mereduksi hal-hal yang tidak penting, serta menginterpretasikan data.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Evaluasi Program

Untuk mengetahui sejauhmana keterlaksanaan suatu program atau kegiatan salah satunya adalah melakukan evaluasi. Evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi secara sistematis, obyektif, dan terstruktur untuk memberikan keputusan terhadap sesuatu obyek.³ Djaali dkk, mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses menilai sesuatu berdasarkan criteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi.⁴ Sedangkan menurut Popham, evaluasi adalah proses pencarian, pengumpulan dan pengambilan data (informasi) yang diperlukan untuk memberikan pertimbangan apakah program yang sedang berjalan perlu diperbaiki, dihentikan atau diteruskan.⁵ Sedangkan dalam buku *Panduan Monitoring dan Evaluasi* dikemukakan "Evaluasi" adalah suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan.⁶

Evaluasi program dilakukan secara sistematis, rinci, dan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. Penen-

³ Norman E. Grounlund and Robert L. Linn. 1990. *Measurment and Evaluation in Teaching*. New York: Mac Milan Publishing Company, h. 5.

⁴ Djaali, dkk. 2004. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: PPs. UNJ, h. 1.

⁵ W. James Popham. 1981. *Modern Educational Evaluation*. New Jersey: Prentice Hall Inc, h. 7.

⁶ Depdiknas. 2002. *Panduan Monitoring dan Evaluasi; Buku 3*. Jakarta: Depdiknas Dikdasmen Direktorat SLTP, h. 2.

tuan kebijakan akan tepat apabila data yang digunakan sebagai pertimbangan tersebut benar, akurat, dan lengkap, karena evaluasi dapat menentukan ketercapaian sebuah program. Seperti diungkapkan Bigman bahwa evaluasi program, yaitu: 1) untuk menemukan apakah tujuan dapat dicapai, dan seberapa jauh dapat dicapai; 2) untuk menemukan prinsip yang melandasi keberhasilan program; 3) untuk melakukan eksperimen-eksperimen dengan teknik-teknik tertentu guna meningkatkan efektifitas; 4) untuk meletakkan dasar guna melakukan penelitian lanjut atas dasar keberhasilan alternatif teknik yang digunakan; 5) untuk meru-muskan kembali cara yang akan digunakan dalam mencapai tujuan, dan bahkan merumuskan kembali sub tujuan sesuai dengan temuan penelitian.⁷

Dengan demikian evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk menilai sejauhmana suatu program dapat dilaksanakan dan sejauhmana keberhasilannya dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisa fakta, data dan informasi. Kemudian data tersebut ditafsirkan dan disimpulkan sejauhmana ketercapaian program tersebut.

2. Madrasah Tsanawiyah-Satu Atap (MTs-SA)

Madrasah Tsanawiyah-Satu Atap (MTs-SA) adalah suatu lembaga pendidikan formal tingkat dasar yang dibangun secara terpadu dengan Madrasah Ibtidaiyah, Diniyah/Salafiyah atau satuan pendidikan sederajat di pondok pesantren. Program pembangunan tersebut adalah dalam kerangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun,⁸ sebagai upaya untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat tertentu yang kesulitan mendapatkan layanan karena letaknya terisolasi atau tidak terjangkau, jauh dari pusat pembangunan atau lokasi pendidikan yang tersedia.

⁷ Leonard Rutman. 1984. *Evaluation Research Methodology*. New Delhi: Sage Publication India PVT. Ltd, 2 ed, h. 123.

Pembangunan Madrasah Tsanawiyah-Satu Atap (MTs-SA) selain untuk meningkatkan akses pendidikan dalam rangka Wajib Belajar juga untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di lingkungan madrasah serta untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan.⁹

Sasaran program diperuntukan bagi: a) pesantren yang memiliki MI atau satuan pendidikan formal sederajat lainnya di bawah naungan Kementerian Agama yang belum ada MTs-nya, serta bagi MIN di luar pesantren dimana siswa kesulitan untuk melanjutkan sekolah karena tidak ada lembaga pendidikan MTs untuk melanjutkan belajarnya; b) diutamakan kelompok masyarakat miskin dan kelompok yang kurang mendapatkan layanan pendidikan secara memadai (*underserver*) terutama di daerah pedesaan, transmigrasi, atau yang mengalami bencana alam; c) program pembangunan mencakup pengadaan gedung, ruang belajar, ruang pendukung dan mebel; d) sasaran cakupan wilayah meliputi provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dengan APK-SLTP kurang dari rata-rata nasional 85,5%. Sasaran program pembangunan madrasah mencakup lebih kurang 500 MTs-SA dengan tipe M1, yaitu terdiri dari 6 ruang belajar dan 4 ruang penunjang, sedangkan tipe M2 terdiri dari 3 ruang belajar dan 2 ruang penunjang. Seluruh sasaran ini dilaksanakan dalam jangka waktu antara tahun 2006-2009.¹⁰

Manajemen program pembangunan MTs-SA dilakukan oleh Komite Pembangunan Madrasah (KPM). KPM dibentuk dengan mengikutsertakan masyarakat. Pelaksanaan program bukan hanya pembangunan fisik dan mebel, tetapi juga mencakup pengangkatan kepala madrasah oleh pesantren dan Kementerian Agama untuk MtsN, penempatan guru/ustadz untuk mata pelajaran tertentu, pengadaan buku pelajaran dan buku penunjang,

⁹ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Madrasah. 2008. Jakarta: *Pedoman Teknis Pembangunan Madrasah Tsanawiyah- Pesantren Satu Atap*, h. 2.

¹⁰ *Ibid.*

alat pelajaran, pelembagaan MTS yang dibangun dan biaya operasional dengan mekanisme BOS sesuai ketentuan. Sedangkan prinsip pembangunan MTs-SA adalah pemberdayaan institusi pendidikan, dan membangun madrasah bersama masyarakat.¹¹

II. DESKRIPSI DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Madrasah Tsanawiyah Satu Atap (MTs-SA) Miftahul Ulum merupakan lembaga pendidikan formal tingkat dasar yang pengelolaannya berada di bawah naungan Yayasan Miftahul Ulum dan berlokasi di Kampung Lebaksono Desa Panacaran Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang. Kondisi masyarakat sekitar madrasah masih tertinggal baik dari sisi ekonomi maupun pendidikan, bahkan menurut Kepala Desa Panacaran, Bisri, daerahnya baru dua tahun, yaitu 2008 bebas dari kategori sebutan desa tertinggal.

Kehadiran MTs-SA disambut antusias oleh masyarakat karena selama ini masyarakat kesulitan untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah lanjutan yang bernuansa agama. Menurut pimpinan pesantren, Ahyani, adanya MTs-SA di Lebaksono telah mempermudah anak-anak untuk melanjutkan sekolah. Sebelumnya anak-anak kesulitan menuju sekolah karena jalannya rusak, bahkan jika musim hujan anak-anak tidak masuk sekolah.¹²

Sambutan masyarakat terhadap MTs-SA dapat terlihat dari jumlah siswa dalam kurun waktu 10 bulan sudah terisi tiga kelas. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Panacaran sangat membutuhkan adanya lembaga pendidikan formal lanjutan terutama yang bernuansa agama. Demikian juga minat siswa cukup tinggi, terlihat dari keikutsertaan siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler, dimana prestasi yang dicapai oleh siswa cukup banyak, padahal madrasah baru berjalan 10 bulan.

¹¹ *Ibid.*, h. 3

¹² Wawancara dengan Ahyani, pimpinan PP. Miftahul Ulum, Lebaksono, 5 Mei 2010

Yayasan Miftahul Ulum selain mengelola MTs juga mengelola lembaga pendidikan non-formal, yaitu Majelis Taklim al-Ikhlash, Madrasah Diniyah dan pesantren. Majelis Taklim al-Ikhlash usianya sudah lumayan tua, karena sebelum adanya yayasan, majelis taklim sudah ada sejak tahun 1975. Jamaahnya kurang lebih berjumlah 40-50 orang, terdiri dari kelompok ibu-ibu dan bapak-bapak. Metode yang digunakan, yaitu ceramah dengan materi pengajian ibadah, akhlak dan tauhid, serta yasinan. Sedangkan kitab rujukannya Al-Quran dan Safinah. Adapun Madrasah Diniyah berdiri tahun 2006. Sebelumnya, tahun 1996, H. Ali Rahman mengembangkan Diniyah, namun vakum dan akhirnya bubar.

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama bagi anak-anak di Desa Panacaran, tahun 2006 dirintis kembali oleh Bisri, anak H. Ali Rahman dan saat ini menjadi kepala Madrasah Diniyah sekaligus Kepala Desa. Saat ini siswanya berjumlah 121 orang dengan jumlah guru 9 orang. Proses pembelajaran dilaksanakan di gedung MTs-SA pada sore hari. Sedangkan Pesantren Salafiyah didirikan tahun 2004 dan dipimpin Ustadz Sarim dan Ustadz Ahyani (menantu Ustadz Sarim). Jumlah santri sebanyak 30 orang. Adapun materi yang diajarkan di pesantren, yaitu al-Quran-Hadits, ibadah, akidah akhlak, dan nahwu sharaf. Sedangkan kitab yang menjadi rujukan, yaitu Qurotul A'in, Riyadh ash-Shalihin, Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan Jurumiah.

B. Pengembangan Akses Pendidikan

1. Kondisi Geografis MTs-SA Miftahul Ulum

Secara geografis MTs-SA Miftahul Ulum letaknya sekitar 50 km dari pusat kota Pandeglang, sedangkan jarak dari Kecamatan Munjul sekitar delapan kilometer. Kondisi jalan yang menghubungkan Pandeglang dengan Munjul dalam keadaan rusak berat dan sarana transportasi sangat kurang. Kerusakan parah terutama terjadi antara perbatasan Kecamatan Saketi-Bojong-Picung sampai Munjul. Pada musim hujan, kondisi jalan licin karena dipenuhi air dan lumpur. Kondisi jalan penghubung antar kecamatan dan poros desa juga minim. Jalan penghubung antar-Kecamatan

Sindang-resmi-Munjul dan Munjul-Cikeusik, misalnya, sudah puluhan tahun hancur. Lapisan aspal mengelupas, hanya menyisakan bebatuan dan lubang. Bahkan, jalan poros desa menuju lokasi, sama sekali belum pernah tersentuh aspal. Badan jalan hanya berupa tanah yang dipadatkan, atau tumpukan batu. Satu-satunya alat transportasi antar desa yang bisa digunakan adalah ojek sepeda motor, karena jika hujan turun, mobil angkutan umum hanya melintasi jalan antar kecamatan. Tidak heran, jika daerah selatan Banten ini masih merupakan kantong kemiskinan. Persentase keluarga miskin di Pandeglang mencapai 30 persen atau 80.756 dari 269.093 keluarga dan khusus penduduk miskin di Kecamatan Munjul sebanyak 15.591 jiwa, termasuk peringkat 8 dari kecamatan yang ada di Pandeglang.¹³

Buruknya akses jalan dan minimnya transportasi mengakibatkan banyak desa terisolasi, seperti Desa Lebak, Desa Curuglanglang dan Desa Panacaran. Desa Panacaran sebagai salah satu desa terisolasi di wilayah Kecamatan Munjul, penduduknya \pm 3850 jiwa. Jarak tempuh dari Kecamatan Munjul ke Desa Panacaran \pm 8 km. Jarak antara satu kampung dengan kampung lain dibatasi hutan atau sawah dengan kondisi jalan rusak berat dan tidak dapat dilalui kendaraan roda empat, bahkan dengan ojek sekalipun, karena jalan dipenuhi lumpur ditambah naik turun bukit. Dengan kondisi demikian, penduduk Kampung Lebaksono dan sekitarnya mengalami kesulitan mobilitas, termasuk dalam hal pendidikan. Di Desa Panacaran terdapat MTs Panacaran dan SMP Ciwalang. SMP di Ciwalang, selain jauh juga kurang menarik bagi masyarakat, karena masyarakat ingin anaknya sekolah dengan pendidikan agama yang memadai.

Kampung Lebaksono dianggap tepat untuk mendirikan MTs-SA, agar masyarakat sebelah utara yaitu Sukawali, Cikadu dan sekitarnya dapat menjangkau lembaga pendidikan terdekat. Sedangkan SMP Ciwalang dan MTs Panacaran lebih tepat untuk melayani masyarakat bagian selatan Panacaran, Ciwalang dan

¹³ Dokumen BPS Kabupaten Pandeglang, 2008

sekitarnya. Keberadaan MTs-SA Miftahul Ulum memberikan akses bagi masyarakat sebelah utara Panacaran, yaitu kampung Sukawali dan Cikadu serta sekitarnya yang kesulitan akses pendidikan karena jarak tempuh ke MTs Panacaran dan SMP Ciwalang kurang lebih antara enam sampai tujuh kilometer.

2. Kondisi Sosial Kultural Lingkungan MTs-SA

Kehidupan masyarakat Panacaran tergolong religius. Hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat pada pengajian majelis taklim. Saat ini di Desa Panacaran terdapat tujuh majelis taklim, yaitu MT Lebaksono, MT Babakan Panacaran, MT Panacaran Khusus, MT Ciwalang, MT Cibarar, MT Cileweng, dan MT Leweung kolot. Masing-masing majelis taklim terdiri dari kelom-pok bapak-bapak dan ibu-ibu. Kegiatannya ada yang mingguan dan bulanan. Kegiatan mingguan di kampung-kampung, sedang-kan kegiatan bulanan di tingkat desa. Jamaah majelis taklim yang hadir pada kegiatan bulanan sekitar 250-300 jamaah.

Ikatan kekeluargaan masyarakat Desa Panacaran cukup kuat. Hal ini terlihat, misalnya dari kegiatan gotong royong membangun rumah, mengerjakan pekerjaan sawah, dan pada saat hajatan atau ditimpa musibah. Adapun secara ekonomi, termasuk kategori miskin. Mata pencahariannya rata-rata petani dan buruh tani (95%), dengan penghasilan rata-rata perbulan kurang lebih antara 200.000 sampai 400.000 rupiah. Penghasilan sebesar itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan makan, itu pun tidak mencukupi jika harus membeli beras, apalagi jika harus membiayai sekolah anak. Karena itu, walaupun sudah ada dana BOS, sebagian masyarakat masih merasa keberatan, karena tidak mampu membeli seragam dan alat keperluan sekolah.

Menurut Kepala Desa, Bisri, masyarakat sebenarnya tidak sulit untuk diajak membangun dan mengembangkan desanya, termasuk untuk mengembangkan pendidikan. Masyarakat sangat berkeingi-nan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun karena faktor ekonomi dan jarak yang jauh dari pusat pendidikan, menyebabkan masyarakat lebih memilih

agar anaknya kerja menjadi pembantu di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak usia 12-15 tahun yang tidak sekolah, mereka bekerja di Jakarta dan Pabrik berjumlah lebih dari 15%

Dengan kenyataan demikian, program MTs-SA di Kampung Lebaksono dilihat dari sisi kondisi geografis, ekonomi dan social cultural serta tingkat APK-nya masih di bawah 85%, nampaknya cukup tepat. Hal ini sesuai dengan pedoman penyelenggaraan MTs-SA, bahwa sasaran program diutamakan kelompok masyarakat miskin dan kelompok yang kurang mendapatkan layanan pendidikan secara memadai (*underserver*) terutama di daerah pedesaan, transmigrasi, atau yang mengalami bencana alam.¹⁴

3. Peta Lembaga Pendidikan di Lokasi

Lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Munjul berjumlah 17 lembaga, terdiri dari SD 10 buah, SMP 4 buah, MTs 2 buah, dan SMA satu buah.¹⁵ Sedangkan jarak dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut dengan MTs Miftahul Ulum antara 3 s.d 8 km. Khusus di Desa Panacaran terdapat dua lembaga pendidikan yang berdekatan yaitu MTs Panacaran dan SMP Ciwalang. MTs Panacaran lokasinya di Kampung Landeh (lembur Landeh) jaraknya dengan MTs-SA kurang lebih empat kilometer dan SMP Ciwalang di Desa Panacaran jaraknya kurang lebih tiga sampai empat kilometer. Namun, lokasi ini dipilih karena di desa lain (Curuglanglang) yang terletak di sebelah Utara Desa Panacaran tidak ada tanah yang memenuhi syarat 3000 m². Tanah yang memenuhi syarat hanya ada di Kampung Lebaksono Desa Panacaran, yaitu milik Yayasan Miftahul Ulum.

Lokasi pendirian MTs-SA berada di tengah-tengah, dapat melayani selain masyarakat Desa Panacaran juga masyarakat kampung Sukawali, Cikadu dan wilayah sekitarnya di Desa Curuglanglang yaitu sebelah utara Desa Panacaran yang jaraknya ke MTs Panacaran sekitar 6 km. Dengan dibangunnya MTs-SA di

¹⁴ *Ibid.*, h. 2

¹⁵ Dokumen BPS Kecamatan Munjul Tahun 2008

Lebaksono, maka Kampung Sukawali dan Cikadu Desa Curuglanglang jaraknya ke sekolah (MTs-SA) menjadi 3-4 km.

MTs Panacaran sendiri kondisinya sangat meprihatinkan. Di atas lahan 700 meter, bangunannya seperti bedeng, siswanya sedikit, yaitu kelas 1 berjumlah 9 siswa dan kelas 2 berjumlah 15, sedangkan kelas 3 tidak ada. Karena kondisinya sangat meprihatinkan, dilihat dari bangunan, manajemen dan proses belajarnya kurang efektif, ditambah tanah MTs tersebut dalam persengketaan antar pengurusnya, maka kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kurang berminat memasukkan anaknya ke MTs Panacaran. Menurut Bisri, Kepala Desa, dengan adanya MTs-SA di Kampung Lebaksono, dan melihat kondisi MTs Panacaran, maka murid MTs Panacaran tersebut rencananya akan digabung dengan MTs-SA, dan bekas MTs Panacaran tersebut bangunannya akan dijadikan Madrasah Aliyah (MA), karena di Desa Panacaran tidak ada Madrasah Aliyah, itupun jika persengketaan antar pengurusnya telah dapat diatasi.

Adapun jumlah anak usia sekolah antara 13-15 tahun di Kecamatan Munjul sekitar 300 orang, sedangkan khusus di Desa Panacaran berjumlah 157 orang. Dari jumlah tersebut, anak yang tidak sekolah di Desa Panacaran lebih dari 15 %. Mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta untuk memenuhi ekonomi keluarga. Sedangkan jumlah lembaga pendidikan khususnya SD yang berjumlah lima buah, berada di Desa Panacaran dengan jumlah siswa rata-rata 130 sampai 200 siswa dan satu buah SD berada di Sukawali dengan jumlah siswa kurang lebih 140 siswa. SD tersebut merupakan basis siswa yang akan masuk ke MTs-SA Miftahul Ulum.

MTs-SA Miftahul Ulum berada di tengah masyarakat yang pemahamannya terhadap pendidikan mulai melek. Namun mereka enggan menyekolahkan anaknya ke jenjang lanjutan, disebabkan karena mayoritas masyarakat/wali murid di kampung Lebaksono penghasilannya rendah, ditambah latarbelakang pendidikan orang tua hanya SD, bahkan sebagian besar tidak lulus SD.

Oleh karena itu, kehadiran Program MTs-SA di daerah ini dapat memberikan motivasi untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan. Masyarakat akan mendapat pencerahan dengan adanya MTs-SA di Desa Panacaran, khususnya masyarakat di kampung Lebaksono, Cikadu dan sekitarnya. Sejak adanya MTs-SA, Kepala Desa terus berusaha menghimbau dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat terhadap fungsi pendidikan secara bertahap menjadi positif.¹⁶

Dengan demikian, jika dilihat dari tingkat APK yang masih rendah, dimana dari jumlah 157 anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah lebih dari 15%, menunjukkan bahwa Desa ini tepat menjadi pilihan penyelenggaraan MTs-SA karena ketentuan sasaran cakupan wilayah meliputi provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dengan APK-SLTP kurang dari rata-rata nasional 85,5 %.¹⁷

4. Ketersediaan Layanan

a. Sarana Prasarana MTs-SA

MTs-SA dibangun di atas tanah seluas 3.000 M2 dengan tipe bangunan M.1. Tanah yang digunakan tersebut milik Yayasan dengan No akte: K.12BA.03.2/145/XII/2007, dan luas bangunan MTs kurang lebih 884,70 m2. Sarana yang tersedia, yaitu 6 ruang kelas, 1 ruang kepala madrasah, 1 ruang tamu, 1 ruang guru, 1 ruang tata usaha, 1 ruang laboratorium, 1 ruang komputer, 1 ruang keterampilan, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang OSIS, 1 ruang PMR, 1 wc kepala madrasah 1 wc guru dan 3 wc siswa serta tempat parkir. Ruangan tersebut tiga lokal digunakan untuk belajar, satu lokal digunakan untuk kegiatan ekstra kurikuler. Masing-masing ruangan kelas berukuran 9m2 x7m2, di dalamnya terdapat papan tulis, 40 kursi, 22 bangku, kursi dan meja guru, serta lemari buku. Demikian juga di ruangan Kepala madrasah terdapat kursi-meja, lemari, dan kursi tamu. Dengan demikian,

¹⁶ Wawancara dengan Habibi, Kepala MTs-SA Miftahul Ulum, 12 Mei 2010

¹⁷ *Ibid.*, h. 2

dilihat dari luas lahan yang tersedia, Yayasan Miftahul Ulum telah sesuai dengan kriteria buku pedoman untuk tipe M1 seluas 3000 meter persegi.

Adapun dilihat dari fasilitas penunjang untuk proses pembelajaran secara umum belum memadai, karena ruangan-ruangan yang disediakan seperti ruangan laboratorium, ruangan komputer, ruangan keterampilan dan ruangan perpustakaan masih kosong. Demikian juga buku-buku pelajaran belum tersedia, sehingga proses pembelajaran menggunakan buku seadanya yang diperoleh dari Kelompok Kerja Madrasah (KKM).

Untuk sarana penunjang perlu diusahakan baik oleh Yayasan maupun oleh Kementerian agama, khususnya buku-buku pelajaran wajib. Karena proses belajar tidak akan berjalan efektif tanpa ditunjang oleh sarana yang memadai. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pedoman, bahwa program penyelenggaraan MTS-SA bukan hanya menyediakan pembangunan gedung dan meubeler, tetapi juga mencakup pengadaan buku pelajaran dan buku penunjang, serta alat pelajaran, pelembagaan MTS yang dibangun dan biaya operasional dengan mekanisme BOS, sesuai ketentuan.¹⁸

b. Kondisi Sumber Daya Manusia

Ketersediaan SDM di MTs-SA cukup memadai untuk ukuran daerah terpencil dan sulit ditempuh. Hal ini dilihat dari tenaga pendidik dan kependidikan yang jumlahnya sesuai kebutuhan, walaupun dari sisi latar belakang pendidikan guru dengan bidang studi masih *mismatch*, khususnya mata pelajaran IPA, Matematika dan IPS. Ketiga mata pelajaran tersebut diampu guru berlatar belakang pendidikan Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Ilmu Agama (PAI). Tenaga pendidik yang ada di MTs-SA berjumlah 15 orang, salah satunya berstatus PNS di sekolah lain dan latar belakang pendidikan S1 sebanyak 3 orang (Fakultas tarbiyah jurusan PAI), D2 sebanyak 5 orang dan sisanya lulusan SLTA di antaranya dua orang lulusan Gontor dan 7 orang (masih kuliah).

¹⁸ *Ibid.*, h. 3

Berdasarkan kualifikasi, maka guru MTs belum memenuhi kualifikasi, karena sebagian besar masih berpendidikan D2 dan SLTA. Padahal dalam UU Guru dijelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat, sementara di MTs-SA rata-rata kualifikasi akademik berpendidikan D2 dan SLTA. Hal ini tentu saja masih jauh dari ideal. Namun jika dilihat dari letak geografi yang cukup jauh dari pusat pendidikan maka dengan kondisi ini dapat dimaklumi sebagai layanan pendidikan bagi masyarakat.

Namun demikian, kepala madrasah dan guru di lingkungan MTs-SA telah mendapatkan pembekalaan manajemen, pelatihan pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang dilakukan melalui workshop oleh MCPM. Tetapi kompetensi manajerial kepala dan guru sampai saat ini masih minim. Salah satu indikatornya, perencanaan madrasah dan perencanaan mengajar guru hanya alakadarnya. Dengan demikian, kepala madrasah dan guru belum profesional. Kehadiran kepala madrasah dan guru belum berjalan efektif. Kepala madrasah datang ke sekolah hanya tiga kali dalam seminggu, karena tempat tinggalnya jauh di Kota Pandeglang. Kehadiran guru sering terlambat, karena jarak tempuh dari tempat tinggalnya ke madrasah jauh.

Menurut Habibi selaku Kepala Madrasah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya diantaranya melakukan koordinasi, dan pembinaan pada gurunya melalui pertemuan rutin yang dilaksanakan sekali-sekali. Untuk pengembangan kompetensi guru telah diadakan kegiatan bedah silabus dan pengembangan RPP yang dibimbing oleh Kelompok Kerja Madrasah (KKM) selama tiga hari, dan untuk menambah wawasan, guru juga mengikuti seminar yang diadakan lembaga lain dengan biaya sendiri.

Guru yang baik secara umum harus memiliki dua kategori yaitu *capability dan loyalty*. Guru harus memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan yang diajarkannya, kemampuan teoretis tentang mengajar yang baik, mulai perencanaan, implementasi

sampai evaluasi dan memiliki loyalitas keguruan yakni loyal terhadap tugas-tugas keguruan, tidak semata-mata dalam kelas tetapi sebelum dan sesudah kelas.¹⁹ Sedangkan kepala madrasah dan guru MTs-SA kehadirannya belum disiplin. Ini menunjukkan bahwa loyalitas guru dan kepala terhadap tugasnya belum optimal.

Kondisi ini mengingat lokasi MTs-SA sulit dijangkau dan jauh dari pusat informasi, sehingga untuk menciptakan proses pembelajaran efektif masih banyak hambatan. Hal ini perlu pembinaan dari yayasan dan Kementerian Agama sebagai penyelenggara program. Jika pembinaan guru dapat dilakukan optimal oleh yayasan dan Kementerian Agama baik pengadaan guru maupun pembinaan kompetensinya ditunjang dengan sarana yang dibutuhkan niscaya penyelenggaraan MTs-SA dapat berjalan efektif.

5. Keterjangkauan Layanan

Sejak dibangunnya madrasah Miftahul Ulum pada Maret 2009 dan selesai pada bulan oktober tahun 2009, masyarakat merasa senang terhadap keberadaan MTs-SA. Menurut Jamhuri, tokoh masyarakat, dengan adanya MTs-SA di Panacaran, desa menjadi ramai dan orang tua pada senang karena anaknya bisa sekolah lebih dekat.²⁰ Demikian juga, menurut Ahyani, pengasuh pesantren, kehadiran MTs-SA di Desa Panacaran ini sangat membantu dan menjadi harapan masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat khususnya masyarakat Desa Panacaran dan sekitarnya. Menurut salah satu siswa, Jumsiah, dirinya senang sekolah di MTs-SA, karena gedungnya bagus, gurunya cukup dan gurunya ada yang dari Gontor. Selain itu kegiatan ekstra kurikulumnya cukup banyak, seperti Pramuka, olah raga, PASKIBRA, PMR, kesenian dan pengembangan diri, seperti latihan pidato dan Pencak Silat.²¹

¹⁹ Dede Rosyada 2007. *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta, Kencana Prenada, h. 111

²⁰ Wawancara dengan Jamhuri, tokoh masyarakat, 7 Mei 2010

²¹ Wawancara dengan Jumsiah, siswa MTs-SA, 8 Mei 2010

Minat siswa terhadap MTs-SA ditandai dengan banyaknya prestasi non akademik yang diraih siswa, yaitu: juara 1 maraton putra tingkat SLTP se-Kecamatan Munjul tahun 2009; juara 3 volly ball putra tingkat SLTP se-Kecamatan Munjul tahun 2009; Juara 2 volly ball putri tingkat SLTP se-Kecamatan Munjul tahun 2009; Juara 2 pidato putra tinggal SLTP se-Kecamatan Munjul tahun 2009; Juara 2 kosidah putri tingkat SLTP se-Kecamatan Munjul tahun 2009 dan Juara 2 sepak bola putra tingkat SLTP se-Kecamatan Munjul tahun 2009.

Selain itu yang membuat masyarakat senang dengan kehadiran MTs-SA, karena di madrasah pendidikan agamanya lebih banyak dibanding sekolah umum (SMP). Seperti diungkapkan Syarim (Ketua Majelis Taklim), bahwa masyarakat desa lebih memilih madrasah karena mengharapkan anaknya memiliki ilmu agama dan berakhlak mulia, bahkan ada orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya di SMP kemudian dipindahkan ke MTs-SA, hanya karena orang tua mengharapkan anaknya mendapatkan agama lebih banyak. Ini menunjukkan bahwa MTs jauh lebih dibutuhkan dibanding SMP. Dengan melihat kenyataan demikian, kehadiran MTs-SA di Kampung Lebaksono sangat tepat. Mengingat Kampung ini selain terisolasi, miskin dan sulit dijangkau, nuansa keberagamaannya cukup kental, mereka lebih memilih MTs ketimbang memilih SMP.

C. Tata Kelola Penyelenggaraan MTs-SA

1. Kepemimpinan

Kepala madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab penting terhadap jalannya organisasi madrasah, mengingat berjalan tidaknya madrasah tergantung pada kepala madrasah. Kepala madrasah dituntut memiliki kompetensi manajerial, karena ia melaksanakan kegiatan manajemen, sekaligus sebagai pemimpin.

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber daya lainnya

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.²² Dengan demikian fungsi dan tugas kepala madrasah adalah melaksanakan fungsi manajer yaitu bertanggungjawab terhadap operasional madrasah, baik dalam perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan.

Dalam hal perencanaan, Kepala MTs-SA telah merumuskan, program tahunan madrasah, yaitu kalender pendidikan, rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah (RAPBM), dan program peningkatan mutu madrasah. Program peningkatan mutu madrasah yaitu program pembinaan setiap hari sabtu. Bentuk kegiatan yaitu pertemuan rutin, bedah kurikulum dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) serta lainnya. Adapun rencana yang telah dirumuskan terkait dengan operasional madrasah yaitu rekrutmen guru, rekrutmen siswa baru, orientasi siswa baru dan menyusun kalender pendidikan dan program tahunan.

Rekrutmen guru dilakukan secara tidak formal, mengingat guru yang mengajar di MTs-SA honorinya sedikit. Oleh karena itu untuk guru tidak banyak persyaratannya yang penting calon guru memiliki syarat *ruhul jihad*. Sedangkan rekrutmen siswa dilakukan melalui kerjasama dengan kepala-kepala Sekolah Dasar, penyebaran brosur, teman-teman seprofesi dan sosialisasi melalui kepala desa.

Adapun struktur organisasi di MTs-SA cukup memadai, dimana terdapat kepala madrasah, M. Habibi, S.Pd.I, tiga wakil kepala, yaitu bid. kurikulum (Atik Sumantri), bid. kesiswaan (Pinpin Nitawati, S.Pd) dan bid. sarana (Siti Rohaena), Bendahara (Nunung K.K, A.M), guru, tata usaha, serta komite madrasah.

Perencanaan program tahunan madrasah dirumuskan berdasarkan hasil musyawarah bersama kepala madrasah, wakil kepala, guru, komite madrasah serta kepala desa. Adapun untuk menarik minat masyarakat, kepala madrasah bersama *stakeholder* telah

²² Malayu S.P Hasibuan. 2003. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, h. 1

melakukan berbagai upaya di antaranya: pertandingan olah raga dan latihan pidato pada setiap hari jumat. Selain itu pada saat kenaikan kelas dan ulang tahun pesantren diadakan acara pawai ta'aruf dengan melibatkan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut diharapkan masyarakat merasa dekat hubungannya dengan madrasah dan kesadaran masyarakat semakin meningkat.

2. Transparansi

Kepala madrasah mengatakan bahwa pengelolaan madrasah selama ini dilakukan secara terbuka, baik dalam merumuskan perencanaan anggaran maupun dalam pengelolaan keuangan. Perumusan anggaran madrasah dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan ketua yayasan, kepala madrasah, guru dan komite madrasah. Berbagai kebijakan yang ditetapkan madrasah dilakukan secara terbuka, baik yang berkaitan dengan kebijakan keuangan, rekrutmen tenaga pendidik dan rekrutmen siswa. Ketua yayasan dan komite selalu mengikuti rapat secara intensif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi madrasah.

Menurut Jazuli,²³ manajemen pengelolaan madrasah sepenuhnya diserahkan kepada kepala madrasah, baik masalah keuangan maupun kebijakan lainnya. Yayasan tidak langsung mengatur masalah keuangan. Namun, yayasan mengetahui kebijakan operasional madrasah. Demikian juga komite ikut terlibat, baik pada perencanaan awal tahun maupun dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sedangkan supervisi dan pembinaan terhadap madrasah baik manajemen pengelolaan madrasah, pengelolaan keuangan maupun proses pembelajaran dilakukan oleh pengawas madrasah dan Kelompok Kerja Madrasah. Namun pengawasan ini baru berjalan sekali, belum berjalan efektif.

3. Kemandirian

Penyelenggaraan MTs-SA Miftahul Ulum selama ini masih tergantung pada dana BOS. Dana BOS yang diterima sangat

²³ Hasil wawancara dengan Jazuli, Ketua Yayasan Miftahul Ulum, 7 Mei 2010

terbatas. Pada tahun pertama (2010), MTs-SA mendapat BOS sebesar 13 juta per-triwulan. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pembayaran listrik, pembelian kapur tulis dan untuk transport guru. Transport guru walaupun ada alokasinya dari dana BOS, namun jumlahnya masih alakadarnya. Bagi guru yang mengajar dua bidang studi dan tatap muka 3 kali dalam seminggu diberikan transport sebesar @ 350.000 perbulan, sedangkan bagi guru yang memegang satu bidang studi dan tatap muka dua kali dalam seminggu diberikan transport sebesar @ 250.000, sedangkan honor kepala madrasah sebesar Rp 300.000. Transport guru jika diukur dari jarak lokasi madrasah dengan tempat tinggal guru sangat tidak memadai. Guru harus menggunakan ojek dengan biaya pulang pergi sebesar 40.000. Berarti jika guru harus datang ke sekolah dalam satu bulan 12 kali tatap muka, maka guru membutuhkan transport sebesar Rp 480.000, belum termasuk transport angkutan umum lainnya. Dengan demikian transport guru belum memadai. Oleh karena itu sesuai dengan kemampuan MTs, rekrutmen guru diutamakan guru yang mau berjuang untuk membesarkan MTs-SA. Menurut kepala madrasah, guru yang mengajar di MTs-SA syaratnya *ruhul jihad*, karena jika guru mengharapkan imbalan yang memadai, madrasah tidak akan mampu membayarnya. Oleh karena itu dalam hal biaya operasional madrasah masih terdapat kendala.

Dengan melihat kenyataan tersebut, untuk keberlangsungan madrasah masih perlu perhatian dari berbagai pihak khususnya dari pemerintah, dengan mengoptimalkan dana BOS. Mengingat madrasah sampai saat ini belum memiliki pendapatan tambahan, karena kondisi ekonomi orang tua murid sangat rendah, bahkan saat ini dengan biaya gratis saja sebagian masyarakat masih merasa keberatan untuk menyekolahkan anaknya ke MTs-SA. Masyarakat keberatan harus membeli baju seragam dan alat tulis, karena untuk keperluan makan sehari-hari saja tidak mencukupi. Karena itu di MTs-SA dari siswa berjumlah 95 orang, sebanyak 12 orang keperluan sekolahnya ditanggung oleh madrasah, karena

orang tua tidak mampu membeli seragam sekolah dan alat tulis. Pada hal dana BOS yang diberikan ke madrasah sangat terbatas.

Menurut ketua yayasan, pengelola MTs-SA harus berjuang keras untuk kemandirian dan keberlangsungan madrasah. Karena kalau hanya mengandalkan BOS saja madrasah tidak akan maju. Oleh karena itu perlu ada usaha-usaha lain yang bisa menambah biaya operasional madrasah. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah mengelola lahan seluas dua hektar, namun karena terbatasnya skill dan modal, maka belum dapat terealisasi. Untuk keberlangsungan penyelenggaraan MTs-SA tersebut, yayasan bersama kepala madrasah, guru dan stakeholder terus berjuang. Salah satunya melakukan pendekatan kepada beberapa lembaga, diantaranya IPB dan LKMD dalam rangka menciptakan kerjasama pemanfaatan lahan pertanian seluas dua hektar.

D. Partisipasi Masyarakat

Kontribusi masyarakat baik pada saat MTs-SA dibangun, maupun pasca dibangun cukup positif walaupun baru sebatas tenaga. Karena memang kondisi ekonomi masyarakat masih minim, belum bisa diharapkan kontribusinya dalam bentuk dana. Pada saat gedung MTs-SA dibangun, masyarakat secara ramai-ramai membantu mengangkut bahan bangunan dari jalan raya ke lokasi MTs-SA yang jaraknya antara empat sampai tujuh kilometer menggunakan ojek sendiri tanpa dibayar, karena mobil pengangkut bahan bangunan tidak bisa masuk lokasi. Masyarakat juga mengambil kayu dan bambu dari hutan untuk kepentingan pembangunan madrasah. Tidak ketinggalan ibu-ibu turut serta merakit atap dari daun kiray pada malam hari untuk atap kobong santri tanpa diberi upah. Kemudian pada perayaan hari-hari besar Islam dan nasional yang diadakan madrasah, masyarakat membantu berbagai kebutuhan perayaan baik berupa makanan maupun tenaga. Sedangkan pasca selesai bangunan MTs-SA, terlihat dari minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke MTs-SA cukup lumayan, terbukti dalam kurun waktu beberapa

bulan saja jumlah siswanya berjumlah 95 orang, terdiri dari kelas satu 72 orang dan kelas dua berjumlah 23 orang.

Adapun dukungan dari Pemerintah Daerah, khususnya dari Kepala Desa sangat tinggi, karena Kepala Desa juga sebagai guru di MTs-SA dan sekaligus sebagai Kepala Madrasah Diniyah, dimana kegiatan belajarnya menempati gedung MTs-SA. Kepala Desa rajin memberikan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang perlunya pendidikan. Sedangkan partisipasi Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang belum ada. Menurut Fahrurrozi, mantan Kasi Mapenda, ada monitoring tapi dari jauh saja melalui telpon. Fahrurrozi mengatakan, dirinya pernah datang ke lokasi Mts-SA satu kali sebelum dibangun, saat mengantar tim verifikasi dari pusat. Namun pasca MTs-SA madrasah beroperasi belum pernah datang lagi.²⁴ Sedangkan menurut Kabid Pontren Kanwil Banten, selama ini tidak ada koordinasi dari pihak MCPM, kecuali sebelum MTs-SA operasional diadakan workshop yang melibatkan Kabid, Kasi dan Pengawas serta Pengelola MTs-SA. Dari pihak Mapenda baik Kanwil maupun Kabupaten hanya diikutkan sebagai panitia yang membantu secara teknis penyelenggaraan workshop. Selain itu pasca selesai pembangunan tidak ada serah terima tanggungjawab yang diberikan pada mereka sebagai penanggung jawab daerah.²⁵ Mapenda Kabupaten Pandeglang tidak pernah datang ke MTs-SA, karena lokasinya jauh dan sulit dijangkau. Selain itu, Mapenda daerah merasa tidak diberikan wewenang. Bahkan Misbah sebagai Kasi Mapenda Kabupaten Pandeglang, belum mengetahui lokasi MTs-SA, apalagi berkunjung. Menurutnya, niat berkunjung ke MTs-SA ada, namun

²⁴Wawancara dengan Fahrurrozi, mantan Kasi Mapenda Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, 9 Mei 2010

²⁵Wawancara dengan H. Iding, Kabid Pontren Kementerian Agama Propinsi Banten, 9 Mei 2010

belum sempat, karena pergi ke Munjul membutuhkan waktu lama.²⁶

Adapun komite madrasah, kehadirannya sangat dibutuhkan oleh madrasah, mengingat perannya yang signifikan dalam menjembatani madrasah dengan orang tua murid. Keterlibatan komite adalah memberikan masukan dan pertimbangan kepada madrasah tentang penyusunan RAPBM; mengadakan pertemuan rutin dengan pihak madrasah; memonitoring penyelenggaraan pendidikan di madrasah; menjembatani kerjasama antara madrasah dengan pihak *stakeholders*; dan mensosialisasikan program madrasah kepada masyarakat. Dengan demikian partisipasi masyarakat baik dari tokoh masyarakat, orang tua murid, maupun pemerintah daerah cukup baik walaupun baru sebatas tenaga dan pemikiran belum pada partisipasi dalam bentuk dana.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelenggaraan MTs-SA Miftahul Ulum telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yakni memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang kesulitan mendapat layanan pendidikan. Karena secara geografis lokasinya di pedalaman, secara ekonomi sebagian besar penghasilan masyarakatnya masih rendah serta masyarakatnya lebih berminat pada sekolah yang bernuasa agama dibanding pada SMP. Lembaga pendidikan ini juga memiliki tanah seluas 3000 m².
2. Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan masih kurang, baru sebatas tenaga dan pikiran. Hal ini dapat dimaklumi karena rendahnya tingkat pendapatan penduduk yang sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani dan buruh tani, ditambah rusaknya akses jalan yang menjadi penyebab mahal-

²⁶Wawancara dengan Misbah, Kasi Mapenda Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, 5 Mei 2010

nya harga barang-barang lain. Ini berarti juga makin beratnya beban hidup masyarakat. Oleh karena itu terpaksa anak-anaknya dituntut bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, walaupun sebenarnya bertentangan dengan keinginannya.

3. Pengelolaan MTS-SA Miftahul Ulum masih banyak hambatan dan kendala baik dari sisi manajemen, tenaga pendidik maupun proses pembelajaran. Dari sisi perencanaan, dan pengawasan belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan pengalaman kepala madrasah masih minim dan ia tinggalnya jauh dari lokasi madrasah selain bidang studi yang diampu oleh guru masih *missmach*.
4. Proses belajar belum berjalan efektif, karena kondisi geografis dan sarana transportasi kurang mendukung. Infrastruktur jalan yang menghubungkan madrasah dengan tempat tinggal guru dan murid dalam keadaan rusak berat dan sulit ditempuh. Sehingga kehadiran guru dan siswa belum disiplin. Sebagian guru dan murid sering terlambat bahkan kalau musim hujan guru dan murid yang tempat tinggalnya di luar Desa Panacaran tidak bisa hadir.
5. Fasilitas belajar belum memadai, perlengkapan untuk keperluan penunjang belajar seperti sumber belajar, komputer, media pembelajaran dan kelengkapan lainnya belum tersedia. Selain itu, biaya operasional masih sangat tergantung pada dana BOS. Oleh karena itu untuk keberlangsungan madrasah masih perlu mendapat perhatian berbagai pihak, terutama pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama.

B. Rekomendasi

1. Untuk kelancaran proses pembelajaran, hendaknya Kementerian Agama segera memberikan sarana penunjang dan segera menugaskan pengawas untuk melakukan pembinaan secara intensif terhadap penyelenggaraan MTs-SA baik manajemen tata kelola maupun proses pembelajaran, agar proses pembelajaran berjalan efektif sehingga gedung madrasah yang cukup megah dapat digunakan secara optimal.

2. Untuk mempermudah mobilitas masyarakat termasuk guru dan murid menuju sekolah, hendaklah pemerintah setempat segera memperbaiki akses jalan menuju Desa Panacaran secara memadai, agar mobilitas masyarakat meningkat yang berarti dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan madrasah.

SUMBER BACAAN

- Dede Rosyada (2007): *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta, Kencana Prenada.
- Djaali, Pudji Mulyono, dan Ramly (2004): *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta, PPs UNJ.
- Departemen Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Madrasah (2008): *Pedoman Teknis Pembangunan Madrasah Tsanawiyah Satu Atap*. Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pendidikan Dasar (AIBEF).
- Depdiknas (2002): *Panduan Monitoring dan Evaluasi*; Buku 3. Jakarta, Depdiknas Dikdasmen Direktorat SLTP.
- Leonard Rutman (1984): *Evaluation Research Methodology*. New Delhi, Sege Publication India PVT. Ltd, 2 ed.
- Malayu S.P Hasibuan (2003): *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Norman E. Grounlund and Robert L. Linn (1990): *Measurment and Evaluation in Teaching*. New York, Mac Milan Publishing Company.
- Popham, W. James (1981): *Modern Educational Evaluation*. New Jersey, Prentice Hall Inc.